

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Abdussamad, Z. (2022). *Buku Metode Penelitian Kualitatif*. <https://osf.io/preprints/juwxn/>
- Ariani, M., Romdoni, M., Salong, A., Sya'rani, R., Judijanto, L., Masturoh, I., Nurjanah, N., Fatmawati, F., & Dhanarto, P. A. Y. (2024). *Pendidikan Anti Korupsi: Mengembangkan Pendidikan Anti Korupsi Sejak Dini*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Chandler, A. (1962). *Strategis dan Struktur*.
- Donaldson, T., & Preston, L. E. 1995. *The Stakeholder Theory of The Corporation: Concepts, Evidence, and Implications*. *Academy of Management Review*, 20(1), 65-91.
- Edward III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington: *Congressional Quarterly, Inc*
- Fathurokhmah, F. (2024). *Metodologi Penelitian Komunikasi Kualitatif*. Bumi Aksara.
- Handayani, L. T. (2023). *Buku Ajar Implementasi Teknik Analisis Data Kuantitatif (Penelitian Kesehatan)*. PT. Scifintech Andrew Wijaya.
- Hasibuan, R. (2021). *Perencanaan dan Evaluasi Kesehatan Masyarakat*. Penerbit NEM.
- Hanson, D., Hitt, M. A., Ireland, R. D., & Hoskisson, R. E. (2016). *Strategic management: Competitiveness and globalisation*. Cengage AU.
- Kusumadmo, E. (2013). *Manajemen Strategi Pengetahuan*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Marrus, Stephanie K.. 1984. *Building the strategic plan: find, analyze, and present the right information*. Wiley. USA
- Muchsin, B., Hamidi, N., & Susanti, A. D. (2023). *Membumikan Nilai Anti Korupsi Melalui Pembelajaran*. Nas Media Pustaka.
- Muhaimin. (2009). *Manajemen Pendidikan: Aplikasi dalam Penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah*. Jakarta: Kencana.
- Muharika, D. (2019). *Metodologi Penelitian Evaluasi Program*. Alfabeta.
- Porter, M. (1980). *Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors*. New York: Free Press.

- P. Siagian Sondang 2002, *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Pasalog, Harbani. 2007. *Teori Administrasi Publik*. Bandung. Alfabeta
- Robbins, S. P. (2003). *Perilaku organisasi*.
- Roosinda, F. W., Lestari, N. S., Utama, A. G. S., Anisah, H. U., Siahaan, A. L. S., Islamiati, S. H. D., Astiti, K. A., Hikmah, N., & Fasa, M. I. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Zahir Publishing.
- Schmeer K. 2000. *Stakeholder Analysis Guidelines*. In: Schribner ES and Brinherhoff D (editor). *Policy Toolkit for Strengthening Health Sektor Reform 2: 1-43*. Bethesda MD. Abt Associates Inc.
- Sukiyat, H. (2020). *Teori Dan Praktik Pendidikan Anti Korupsi*. Jakad Media Publishing.
- Umar, H., Purba, R. B., Safaria, S., Mudiar, W., & Sariyo, H. (2021). *The New Strategy In Combating Corruption (Detecting Corruption: HU-Model)*. Merdeka Kreasi Group.
- Walgito Bimo. 2010. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Andi
- Wijaya, H. (2018). *Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi*. Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.
- Wijaya, H. (2020). *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan*. Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.

JURNAL:

- Afrinah, R. T., & Sodik, M. A. (N.D.). *Peran Pendidikan Formal Dan Kpk (Komisi Pemberantasan Korupsi) Dalam Strategi Anti Korupsi*.
- Anam, M. A. S., & Arif, M. (2016). Lembaga Pendidikan Islam Sebagai Wahana Implementasi Pendidikan Anti Korupsi. *Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal Of Islamic Education Studies)*, 3(2), 368.
- Angkat, I. S., & Koto, I. (2024). Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Fungsi Preventif Melalui Pendidikan Anti Korupsi. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 6(2), 1841–1852.
- Azharada, A., & Meiwanda, G. (2022). Implementasi Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Unit Kerja Layanan Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Pesisir Selatan. *Jurnal Administrasi Negara*, 28(2), 113–137.

- Azim, M. F. (2022). MEMBERANTAS KORUPSI DARI KAMPUS. *Scripta: Jurnal Kebijakan Publik Dan Hukum*, 2(II), 271–287.
- Fadilla, A. R., & Wulandari, P. A. (2023). Literature Review Analisis Data Kualitatif: Tahap Pengumpulan Data. *Mitita Jurnal Penelitian*, 1(3), 34–46.
- Fatah, A., Jaya, N. S. P., & Juliani, H. (2016). Kajian Yuridis Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi. *Diponegoro Law Journal*, 6(1), 1–15.
- Fatimah, I. F. (2021). Strategi Inovasi Kurikulum. *Eduteach: Jurnal Edukasi Dan Teknologi Pembelajaran*, 2(1), 16–30.
- Haji, B. T. (2020). Pengertian Implementasi. *Laporan Akhir*, 31.
- Haris, R. A. (2017). Implementasi Kebijakan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Di Kabupaten Sumenep. *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2(2), 102–111.
- Hasanah, S. U. (2018). Kebijakan Perguruan Tinggi Dalam Menerapkan Pendidikan Anti Korupsi. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(1).
- Hidayat, T., & Purwokerto, U. M. (2019). Pembahasan Studi Kasus Sebagai Bagian Metodologi Penelitian. *Jurnal Study Kasus*, 1–13.
- Kadir, Y. (2018). Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi Di Perguruan Tinggi. *Gorontalo Law Review*, 1(1), 25–38.
- Nabila, D., Kesuma, R. P., & Evangelia, J. (2024). Strategi Pemerintah Kota Bandar Lampung Untuk Mencegah Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan Kerja. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora*, 2(5), 58–65.
- Nurdiana, R., Soraya, Y. W., Maulidah, R. D., & Ulum, M. (2024). Peran Pendidikan Anti Korupsi Dalam Menyiapkan Pemuda Untuk Menciptakan Pemimpin Yang Jujur Dan Berintegritas. *Esensi Pendidikan Inspiratif*, 6(3). <https://Journalpedia.Com/1/Index.Php/Epi/Article/View/2458>
- Ramadani, T. (2019). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Komunikasi Publik Di Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral The Implementation Of Public Communication Management Policy At Ministry Of Energy And. *Jurnal Borneo Administrator*, 15(1), 1–18.
- Sadiah, D. (2017). Pengorganisasian Dana Ziswaf Pada Program Ekonomi Masyarakat Mandiri. *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah*.
- Satriyo, U. (2023). Diskursus Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Negara Independen Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/Puu-Xvii/2019. *Al-Qisth Law Review*, 6(2), 245–273.
- Sugandha, W. (2009). Implementasi Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

- Dalam Rangka Otonomi Daerah* (Doctoral Dissertation, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro).
- Surbakti, K., & Surbakti, K. (2021). Analisis Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi Di Perguruan Tinggi. *Jurnal Justika*, 3(1), 45–58.
- Vinata, L. P., & Zulfiani, A. (N.D.). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Dan Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Retrieved November 15, 2024, From
- Widyastono, H. W. H. (2013). Strategi Implementasi Pendidikan Anti Korupsi Di Sekolah. *Jurnal Teknodik*, 194–208.
- Yuliah, E. (2020). Implementasi Kebijakan Pendidikan. *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum Dan Pendidikan*, 30(2), 129–153.
- Zuber, A. (2018). Strategi Anti Korupsi Melalui Pendekatan Pendidikan Formal Dan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). *Journal Of Development And Social Change*, 1(2), 178–190.

THESIS:

- Ali, M. (2016). *Persepsi Masyarakat Gayo Tentang Pacuan Kuda Menurut Konsep Islam* [Phd Thesis, Uin Ar-Raniry Banda Aceh].
- Deffiany, S. (2023). *Implementasi Kerjasama Ombudsman Republik Indonesia Dan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik* [Phd Thesis]. Universitas Islam 45 Bekasi.
- Putra, A. (N.D.). *Implementasi Kebijakan Pendidikan Wawasan Kebangsaan Studi Tentang Pembinaan Wawasan Kebangsaan Pada Generasi Muda Saat Pandemi Covid-19 Oleh Suban Kesbangpol Jakarta Selatan* [B.S. Thesis, Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas ...]. Retrieved November 15, 2024.
- Rohman, K. H. (2023). *Konstitusionalitas Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Organ Konstitusi Dalam Undang-Undang Dasar 1945* [Phd Thesis, Universitas Islam Indonesia].
- SUKMA, W. M. (2023). *Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Dalam Penilaian Hasil Belajar Siswa Mata Pelajaran Pjok Pada Tingkat Satuan Pendidikan Tingkat Atas Kelas X Kabupaten Sintang* [Phd Thesis, IKIP PGRI PONTIANAK].

PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN:

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, *tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, *tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.*

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, *tentang tindak pidana korupsi melanggar undang-undang nasional dan merugikan keuangan negara.*

Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 , *tentang tindak pidana pencucian uang*

Undang-Undang No.30 Tahun 2002, *tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi membentuk komisi untuk menjalankan tugas yang telah ditetapkan sebelumnya dalam undang-undang tipikor.*

Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 perubahan kedua Undang-Undang No 30 Tahun 2002 pasal 7 *tentang KPK yang berwenang menyelenggarakan pendidikan anti korupsi.*

Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010, *tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.*